

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan yang baik dapat menjamin tercapainya seluruh pembangunan. Perencanaan harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, agar kegiatan yang ingin dicapai bisa berjalan dengan benar. Untuk keberhasilan pembangunan, terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan prinsip-prinsip perencanaan yang baik, dimana prinsip-prinsip tersebut adalah dengan melihat situasi saat ini, kegagalan masa lalu, potensi, tantangan dan hambatan serta ancaman yang menjadi peluang. Meningkatkan program pembangunan disemua bidang sebagai media informasi yang sempurna dan berkaitan dengan orang-orang banyak untuk bersama berkembang dengan teknologi digital sebagai harapan pengelolaan pemerintah daerah masa kini dan masa mendatang (Ekonomi et al., 2022).

Perkembangan teknologi informasi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan tersebut telah mengantarkan manusia semakin mudah untuk berhubungan satu dengan lainnya, diantaranya yaitu mempermudah dalam berkomunikasi tanpa memikirkan jarak, tempat dan waktu, mudah dan cepat dalam mendapatkan informasi karena adanya internet serta mempermudah dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Adapun salah satu teknologi informasi yang dimaksud yaitu sistem informasi. Sistem informasi (SI) merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen (Perencanaan et al., 2020).

Sebuah negara sudah pasti memiliki sistem pemerintahan, yang mana sistem pemerintahannya terdiri atas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang diatur dalam Pasal 18 UUDNRI Tahun 1945. Perkembangan sistem informasi di Indonesia berkembang begitu cepat. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk peningkatan kemampuan dari pengelolaan pemerintah. Contohnya dengan pengelolaan keuangan dan perencanaan daerah, pemanfaatan dari teknologi memang sangat dibutuhkan dalam proses pengelolaan pemerintahan. Dengan tersedianya teknologi dalam pemerintahan, memberikan kemudahan bagi instansi pemerintahan dalam penyediaan pelayanan berkualitas agar tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik.

Kemendagri dalam upaya meningkatkan program pemerintah meluncurkan Permendagri No.70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang otomatis menggantikan Permendagri sebelumnya yaitu Permendagri No. 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif dan cepat pada 14 Oktober 2019 (Adisi & Sadad,2022). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan amanat dari UU 23 Tahun 2014 Pasal 391 dimana pemerintah daerah wajib menyediakan Informasi pemerintahan daerah, yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) , sehingga pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) SIPD yang dirancang lebih adaptif, reponsif, dinamis, inovatif dan akuntabel.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ini dibangun untuk memenuhi amanat UURI Nomor 23 Tahun 2014, dan merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ini juga didukung dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Nirmala et al., 2023).

Penerapan kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ini tidak lepas karena penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kian aktif, sehingga kebutuhan akan sebuah sistem informasi yang berfungsi untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Akuntabilitas dan transparansi pemerintahan sangat dibutuhkan, karena merupakan salah satu bentuk dari *Open Government Indonesia* (OGI) dan perubahan pola kerja yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai bentuk adaptasi dari revolusi industri 4.0. Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan keuangan daerah, beraneka platform sistem informasi oleh daerah-daerah sehingga menyulitkan dilakukan integrasi, terpisahnya sistem perencanaan dan keuangan mengakibatkan berbagai permasalahan di daerah (Nirmala et al., 2023).

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ini memuat sistem keuangan daerah, sistem perencanaan pembangunan daerah serta sistem pengawasan pemerintah daerah, selain itu sebagai sarana untuk pengumpulan, pengolahan, penyajian dan referensi dalam komunikasi informasi keuangan daerah dan juga

sebagai pengendalian maupun pemantauan serta evaluasi atas pendanaan dan defisit anggaran daerah dimana sistem ini diakses langsung oleh pemerintah pusat.

Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sudah menjadi kewajiban oleh pemerintah daerah kabupaten Ogan Komering Ulu agar dapat sejalan dengan *good governance*. Oleh sebab itu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ini telah diterapkan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Ogan Komering Ulu termasuk di Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering ulu. Salah satu mekanisme yang memudahkan Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam mengelola data informasi yang ada. Penerapan aplikasi SIPD sudah dilaksanakan di seluruh Indonesia sejak tahun 2020 yaitu dimulai dengan penyusunan APBD tahun anggaran 2021. Dengan melihat kondisi saat ini, dimana APBD tahun anggaran 2021 adalah tahun pertama dalam penerapan SIPD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa harus satu aplikasi saja yang beroperasi pada bidang subbagian program dan keuangan. SIPD diprogramkan oleh pemerintah pusat agar memudahkan sumber daya manusia dalam pekerjaan akan tetapi, dalam penerapan SIPD tidak berjalan dengan baik karena aplikasi yang digunakan sangat jauh berbeda dengan yang digunakan sebelumnya, yaitu aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah daerah sudah melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri. Namun, permasalahan di setiap daerah belum teratasi sepenuhnya, salah satunya yaitu sumber daya manusia (SDM). Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam

keberhasilan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Namun tantangan terkait SDM sering kali menjadi hambatan efektivitas sistem ini. Beberapa aspek yang menyebabkan SDM menjadi permasalahan dalam SIPD yaitu:

1. Keterbatasan keterampilan dan pengetahuan, banyak pegawai pemerintahan memiliki latar belakang pendidikan yang tidak memadai dalam teknologi informasi. Keterbatasan ini mengakibatkan kesulitan dalam mengoperasikan SIPD, serta kurangnya pemahaman tentang manfaat dan fungsi sistem.
2. Resistensi terhadap perubahan, pegawai yang telah terbiasa dengan prosedur manual sering kali menunjukkan resistensi terhadap penggunaan sistem baru. Perubahan sistem dalam pekerjaan dapat menimbulkan ketidaknyamanan, sehingga pengoperasian SIPD tidak berjalan dengan baik.
3. Minimnya pelatihan dan pengembangan, banyak instansi yang belum menyediakan pelatihan yang memadai untuk pegawai dalam menggunakan SIPD. Tanpa pelatihan yang tepat pegawai tidak bisa menggunakan SIPD secara maksimal.
4. Beban kerja yang tinggi, dalam banyak kasus, pegawai menghadapi beban kerja yang berat dan kekurangan staf. Hal ini mengurangi waktu dan energi yang tersedia dalam pembelajaran SIPD.
5. Budaya organisasi, budaya kerja yang tidak mendukung inovasi dan pembelajaran dapat menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi teknologi baru. Jika organisasi tidak mengutamakan pengembangan SDM, pegawai akan kurang termotivasi untuk beradaptasi dengan sistem yang ada.

6. Kurangnya dukungan manajemen, tanpa dukungan yang kuat dari manajemen maka pegawai akan merasa tidak didorong dalam menggunakan SIPD. Kebijakan yang kurang jelas dan tidak adanya insentif dapat mengurangi komitmen pegawai.
7. Sumber daya yang terbatas, keterbatasan anggaran di beberapa daerah dapat menghalangi investasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM. Tanpa dukungan finansial yang memadai, upaya untuk meningkatkan keterampilan pegawai menjadi terhambat.

Penerapan SIPD pada Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu sendiri sudah berjalan cukup baik, walaupun masih ada beberapa permasalahan terkait penggunaan SIPD dikarenakan masih kurangnya tenaga pelaksana dalam operasinya, pergeseran anggaran yang tertunda, sistem yang melakukan pembaharuan , serta SIPD sendiri masih sering mengalami error ketika banyak yang mengakses aplikasi ini khususnya pada jam kerja.

SIPD dapat dimanfaatkan oleh pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Kecamatan baik ditingkat pelaporan maupun ditingkat akuntansi, untuk mendorong tercapainya akuntabilitas yang diharapkan, sehingga guna mendukung hal tersebut diterbitkanlah teknologi software SIPD. Permendagri No. 13 Tahun 2006 mengenai Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah, merupakan pengatur dari sebuah implementasi sistem informasi akuntansi. Sinkronisasinya, dalam pemerintahan daerah harus membuat laporan keuangan guna melaksanakan kewajiban kelola keuangan daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ialah wujud kewajiban pemerintahan atas kelola sumber daya

dimanfaatkan oleh pemerintah dalam 1 (satu) masa PP No. 71, Tahun 2010 menitikberatkan pada standar akuntansi pemerintah untuk landasan saat penyusunan laporan keuangan daerah. Untuk mengimplementasikan dasar kelola keuangan yang bermutu, berhasil, praktis juga terbuka dan akuntabel, dibutuhkan prosedur kelola data keuangan yang kilat, cermat dan eksplisit (Damayanti & Destiningsih, 2020). SIPD dapat membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang disusun melalui SIPD dapat memastikan bahwa angka dan laporan keuangan dikelola dan disajikan secara akurat dan akuntabel. SIPD keuangan contohnya, merupakan sebuah teknik atas berbagai teknik teknologi informasi pengelolaan data keuangan yang dapat di implementasikan sebagai kepentingan tersebut. Untuk pelaporan keuangan dinas disatukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD), yang selanjutnya akan dilaporkan ke pemerintah pusat. BPKAD sendiri merupakan instansi pemerintah daerah yang bertugas mengelola keuangan dan asset daerah, termasuk menyatukan data mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) antara lain (Dewi et al., 2023) yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan (Mustaqmah & Putri, 2022) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan atau SIPD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, penelitian (Defitri, 2018) dan (Leunupun et al., 2022) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap

kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ada ke tidak konsistenan penelitian sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut.

Dari latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sudah berjalan dengan baik pada Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu?
2. Apakah implementasi yang baik dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu sudah berjalan dengan baik.
2. Untuk mengetahui apakah implementasi yang baik dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian seperti yang dinyatakan diatas, diharapkan bahwa penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini akan memberikan manfaat kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan sarana studi banding antara teori yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan dengan kondisi nyata yang ada di dalam pemerintah daerah dalam pengembangan wawasan di bidang akuntansi sektor publik terutama tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Akuntansi pada program studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

2. Bagi Objek Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan suatu gambaran yang lebih baik bagi instansi akan pentingnya penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam menunjang penginputan data yang efektif dan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan apabila seandainya ada hal-hal yang perlu diperbaiki, sehingga instansi dapat beroperasi dengan efektif.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan pengembangan penelitian tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Dinas Pertanian Kabupaten OKU.